

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional adalah subjek sejarah yang berfokus pada studi perang dan perdamaian dan identik dengan politik, pemerintah, dan kekuatan keras mereka. Di masa lalu, fokus hubungan internasional juga pada ikatan politik, yang umumnya disebut sebagai politik tinggi. Namun, perubahan zaman telah membawa perubahan pada hubungan internasional. Perubahan tersebut telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor non-negara dengan mengedepankan *soft power* dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya, daripada memusatkan perhatian dan kajiannya pada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar negara yang ruang lingkungannya melintasi batas negara.

Hal ini relevan dengan pernyataan Charles A. Mc Clelland, yang menyatakan bahwa hubungan internasional adalah merupakan studi yang mencakup diskusi tentang semua bentuk pertukaran, hubungan, arus informasi, dan berbagai tanggapan perilaku yang muncul di antara masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponennya (McCelland, 1981). Evolusi yang difokuskan pada hubungan internasional memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan era globalisasi, yang berarti proses tatanan masyarakat global yang tidak mengenal batas wilayah karena globalisasi identik dengan penggunaan teknologi yang tampaknya mampu menghilangkan batas-batas wilayah.

Memasuki fase revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bidang industry, ekonomi, pertahanan, keamanan, diplomasi, sosial, politik, budaya, hingga pendidikan terdampak dengan adanya Revolusi Industri. Pada sektor ekonomi perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki modal besar, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi sangat diuntungkan dan setuju dengan adanya perkembangan teknologi, sebab dapat mempermudah transaksi jual-beli dan promosi.

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah konsep yang menggambarkan rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi pada industry dunia. Revolusi Industri 4.0 mulai di populerkan oleh seorang ekonom yang berasal dari Jerman yaitu Profesor Klaus Schwab, melalui bukunya yang berjudul *The Fourth Industrial Revolution*. Pada bukunya ia menjelaskan bahwa revolusi industri merupakan konsep yang merubah hidup dan pola kerja manusia.¹

“The Fourth Industrial Revolution, finally will change not only what we do but also who we are. It will affect our identity and all the issues associated with it: our sense of privacy, our notions of ownership, our consumption patterns, the time we devote to work and leisure, and how we develop our careers, cultivate our skills, meet people, and nurture relationship.”

Kegiatan ekonomi seperti transaksi jual-beli, perbankan, permodalan, yang memanfaatkan teknologi digital dapat dikategorikan sebagai ekonomi digital.

¹ Trailhead, “*Understand the Impact of the Fourth Industrial Revolution on Society and Individuals*”, 2023, <https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/impacts-of-the-fourth-industrial-revolution/understand-the-impact-of-the-fourth-industrial-revolution-on-society-individuals>, diakses pada 20 July 2023

Definisi ekonomi digital juga diperkuat oleh pendapat Amir Hartman di dalam bukunya *Net Ready-Strategies for Success in the E-Economy* tahun 2000 yang mendefinisikan bahwa ekonomi digital merupakan sebuah tempat virtual dimana bisnis dijalankan, nilai dibuat dan di pertukarkan, transaksi berjalan serta matangnya hubungan satu negara ke negara lainnya dengan hanya menggunakan internet dan TIK sebagai media untuk menjalankannya. Mendengar istilah mengenai ekonomi digital sekarang sudah umum digunakan dan diterapkan di berbagai negara yang teknologinya maju, dan bahkan di negara berkembang yang teknologinya masih tertinggal dari negara maju juga ikut menerapkan dan mengembangkan ekonomi digitalnya.

Pada tahun 2022 perhelatan KTT G20 di Indonesia, tepatnya di Nusa Dua Bali merupakan momen penting bagi seluruh anggota di G20 terutama Indonesia. Dalam forum tersebut terdapat beberapa pembahasan penting salah satunya mengenai transformasi digitalisasi pada sektor ekonomi yaitu ekonomi digital. Dalam forum tersebut, Indonesia mengeluarkan kebijakannya dalam peningkatan ekonomi digitalnya di forum tersebut. G-20 dapat di definisikan sebagai sebuah forum baru untuk mengelola isu-isu yang terjadi di ranah global.

Kerjasama Indonesia untuk peningkatan ekonomi digital dalam forum G-20 sangatlah penting. Di Indonesia sendiri ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2021, hal tersebut didorong oleh pola konsumsi masyarakat dan juga merebaknya pandemi Covid-19. Akan tetapi untuk dapat meraih potensi pertumbuhan di tahun 2022 yang diperkirakan oleh Badan Kebijakan Fiskal bisa mencapai 10,3%, membutuhkan dukungan dari berbagai

kerjasama dan juga kebijakan, termasuk yang terkait dengan perlindungan konsumen digital dan jaminan keamanan dalam bertransaksi. Di tahun 2022 ini dimana Indonesia memegang momentum sebagai Presidensi G-20 sangatlah baik untuk peningkatan kerjasama Indonesia dalam ekonomi digital. Anggota G-20 sendiri merupakan negara-negara penghasil teknologi mutakhir dan terbaru sehingga Indonesia bisa mengambil keuntungan dari momentum yang sangat bersejarah ini.

Lahirnya G-20 di latarbelakangi dengan adanya konteks globalisasi yang terus menguat. Berbagai literatur yang membahas mengenai globalisasi telah memberikan suatu pandangan bahwa dunia terbentuk menjadi semakin kecil, dan tidak ada negara yang tidak rentan terhadap pengaruh yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Memiliki ketergantungan di antara negara juga menjadikan sebuah ciri sentral dari tren globalisasi kontemporer dan dalam konteks ini kerjasama di antara negara-negara di dunia menjadi suatu keharusan.² Fenomena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1990-an menandakan bahwa dunia baru membutuhkan pendekatan baru untuk merespon dunia yang semakin kecil.

Pada tahun 1994 tepatnya pada bulan Desember, nilai mata uang Peso Mexico jatuh hal tersebut menandai krisis finansial yang terjadi di negara Mexico. Jatuhnya mata uang Peso Mexico memiliki imbas yang di rasakan oleh negara-negara di Amerika Selatan. Selanjutnya negara Indonesia, Thailand dan juga Korea Selatan mengalami krisis moneter yang parah pada tahun 1997, dengan adanya krisis

² Margaret Karns and Karen A. Mingst, *“International organizations: The politics and processes of global governance”*, Boulder Colo: Lynne Rienner Publisher, London, 2004.

moneter di negara-negara tersebut dampaknya di rasakan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia. Selain itu kerentanan finansial juga terjadi di negara Rusia pada tahun 1998, selanjutnya terjadi di Brazil pada tahun 1999-2002, dan Argentina pada tahun 2000-2001. Lalu beberapa negara, seperti India dan China telah menanggapi krisis finansial dengan berbagai cara. Berbagai cara yang di tempuh juga memiliki resiko pada meledaknya angka pengangguran dan berkurangnya daya beli masyarakat, lebih lanjut lagi hal tersebut memiliki dampak yang sistemik pada transaksi perdagangan dunia.

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1990-an tersebut menjadi perhatian serius bagi para menteri keuangan terutama yang berada pada negara-negara maju dan mengantarkan pada pengakuan bahwa sudah saatnya mereka harus mengajak negara-negara yang perekonomiannya menguat (*emerging economics*) untuk bergabung dalam diskusi tentang penataan struktur finansial global. Paul Marting yang merupakan seorang menteri keuangan Kanada dan Lawrence Summer yang merupakan Menteri Keuangan Amerika Serikat, mereka berdua kemudian mengambil inisiatif untuk memulai penyelenggaraan dialog-dialog G-22 dan G-33, di mana negara-negara dengan perekonomian yang signifikan secara geografis dan ekonomik turut di undang di dalamnya. Dialog G-20 yang reguler di selenggarakan pada bulan Desember 1999 dan terus di lembagakan setiap tahunnya hingga saat ini. G-20 di sebut oleh para perintisnya sebagai terobosan baru “*to make a smaller world governable and fairer*” (untuk membuat dunia yang semakin kecil dapat di kelola dan lebih adil).

G-20 merupakan sebuah komite baru yang bertugas untuk mengelola isu-isu global. Komite yang awalnya beranggotakan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 8 negara atau disebut dengan G-8, dan juga di tambah 10 negara dengan perekonomian yang menguat plus Australia dan Uni Eropa. Lahirnya G-20 memiliki pandangan sebagai kompromi baru yang lebih baik antara kerjasama-kerjasama multilateral yang ada. Jumlahnya yang lebih besar, sekalipun tidak terlalu besar di bandingkan G-7, memberikan peluang bagi dialog-dialog yang lebih fleksibel dengan hasil yang nyata lebih cepat, jumlahnya tentu jauh lebih sedikit dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkesan sangat lambat dalam penanganan isu-isu krusial yang di hadapi oleh dunia. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G-20 meyakini kemampuan dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

G-20 sudah memulai aktivitasnya sejak di bentuk pada tahun 1999 di Jerman. Namun forum intergovernmental ini baru di kenal komunitas internasional secara luas terutama sejak tahun 2008 ketika pemimpin-pemimpinnya memutuskan mengubah tingkat pertemuannya dari level menteri ke level Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. G-20 menjadi high profile forum dengan di gelarnya KTT pertama di Washington. Pemimpin pun bersepakat untuk mengadakan pertemuan KTT dua kali dalam setahun dengan agenda urgent untuk mengatasi krisis finansial yang melanda dunia.

Profil G-20 semakin meroket ketika pemimpin-pemimpin G-20 bersepakat untuk menjadikan G-20 sebagai *premier forum for economic cooperation* (forum utama kerjasama ekonomi). puluhan komitmen telah di buat dan implementasinya

telah di upayakan oleh masing-masing anggota G-20. Setiap anggota di tuntutan untuk memperkuat lembaga keuangan domestik mereka melalui permodalan yang kokoh dari hantaman krisis likuiditas, untuk membuat kebijakan fiskal yang transparan dan akuntabel, kebijakan perdagangan yang anti proteksionisme, dan lain-lain. Reformasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank merupakan inisiatif terpenting di antara inisiatif-inisiatif yang mendesak dan penting lainnya dalam penataan arsitektur finansial global.

G-20 di bangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilateralisme. Jumlah anggotanya yang 20 di pandang signifikan dan sistematis. Kedua puluh anggota secara keseluruhan menguasai 80% lebih perekonomian dunia yang di tandai dengan pertumbuhan GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdagangan dunia dan populasi dunia. Asumsi yang di yakini adalah bahwa bila perekonomian di dua puluh anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia. Sehingga, keberhasilan forum ini akan membawa dampak sistemik yang signifikan bagi negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat ini tidak menjadi anggota G-20. Pertumbuhan ekonomi di kedua puluh anggota ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di negara-negara lain.³

Posisi dan peran Indonesia terhadap G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional sangat jelas, yaitu mendukung secara penuh wadah formal yang merangkul negara maju dan negara berkembang. Indonesia sebagai satu-satunya anggota permanen menurut forum G-20 di kawasan melalui kiprahnya pada

³ The White House, November 15, 2008, "Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy", https://www.fsb.org/wp-content/uploads/pr_151108.pdf, diakses pada 15 April 2023.

menginisiasi pembentukan ASEAN menjadi jembatan pada mewujudkan dilema-dilema ekonomi daerah, keberhasilan Indonesia dalam mengatasi krisis keuangan dalam tahun 1998 yang di evaluasi relatif baik, partisipasi konkret Indonesia pada setiap lembaga ekonomi global, dan juga salah satu negara pada kawasan yang memiliki skala besar pada perdagangan global. Hal tersebut menjadi tonggak harapan untuk mengutarakan kepentingan negara-negara ASEAN dan negara berkembang lainnya. Negara berkembang sangat berharap akan terbukanya akses pasar global bagi komoditas yang di dapatkan lantaran selama ini terkendala menggunakan adanya kebijakan perlindungan yang di terapkan oleh Eropa, Amerika Serikat, dan negara besar lainnya.

Pada G-20 di bawah Presidensi Jerman, Indonesia berperan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat seperti arahan Presiden pada Sidang Kabinet sehingga terdapat beberapa agenda, yaitu, digitalisasi, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri akan membagikan pengalamannya mengelola transisi ekonomi digital dengan memperkuat kontribusi masyarakat melalui success story di sektor transportasi publik. Peranan Indonesia lainnya yaitu mengajukan *Global Expenditure Support Fund* (GESF) yang merupakan dukungan terhadap negara-negara berkembang dalam mengamankan anggaran nasional dari krisis likuiditas, *Global Infrastructure Connectivity Alliance* (GICA) yang mendukung keterhubungan melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan, dan juga *Inclusive Digital Economy Accelerator* (IDEA HUB) yang merupakan forum berkumpulnya para unicorn di seluruh negara G-20 untuk saling bertukar ide. Indonesia pernah menjadi Co-Chair Anti Korupsi bersama Prancis

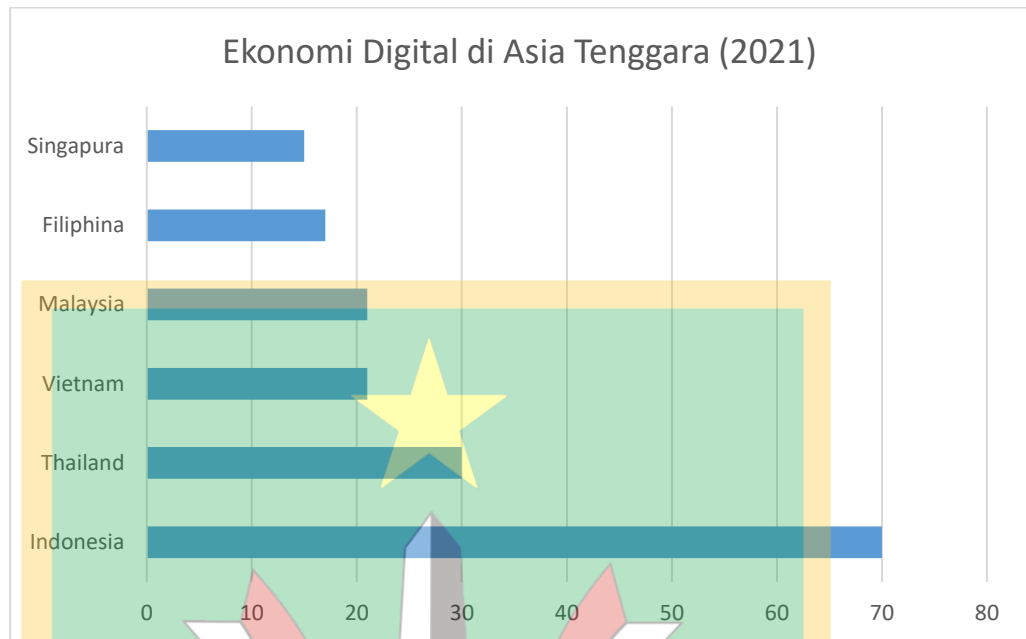
pada tahun 2010-2011, *Co-Chair Working Group on Energy and Commodities Markets* bersama Inggris 2012, Tuan Rumah pertemuan *Study Group on Financing for Investment Working Group* di Jakarta pada tahun 2014 dan Bali pada tahun 2016.⁴ Kemudian, Indonesia secara resmi terpilih menjadi Presidensi G-20 pada tahun 2022 dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” yang meminta negara-negara di dunia untuk mencapai pemulihan yang kuat bersama-sama. Dalam kesempatan kali ini, Indonesia akan membawa beberapa topik utama, yaitu Sistem Kesehatan Dunia, Transformasi Ekonomi dan Digital, dan Transisi Energi.

Dalam upaya peningkatan ekonomi pasca pandemi dan juga transformasi ekonomi digital, Pemerintah sudah mempersiapkan roadmap dan mendorong infrastruktur digitalisasi sehingga di perlukan pemanfaatan sistem komunikasi satelit orbit rendah atau low earth orbit satellite dalam meraih pelayanan komunikasi sampai wilayah terpencil dan lebih terjangkau sehingga tidak terjadi kesenjangan digital.⁵ Indonesia pun hingga saat ini sangat gencar sekali dalam peningkatan potensi ekonomi digital, di mana menurut hasil riset dari Google, Temasek, dan Bain&Company, gross market value (GMV) dari ekonomi digital Indonesia mencapai US\$70 miliar pada 2021, menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Gambar 1. Indeks Ekonomi Digital di Asia Tenggara 2021

⁴ S. Sushanti, 2019, “*Aktualisasi Indonesia Dalam G20: Peluang atau Tren*”. Jurnal Ilmiah Widya Sosio Politik, hal 1-14.

⁵ Kementerian Keuangan, 2020, “*Stimulus Fiskal di tengah Badai Pandemi*”, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/Opini%20Kajian%20Artikel%20Pa-per%20Jurnal/Opini%20-%201%20Juli%202020%20-%20Stimulus%20Fiskal%20di%20tengah%20Badai%20Pandemi%20-%20Ahmad%20Su'aidy%20-%20DJA.pdf>, diakses pada 15 April 2023.



Sumber: Google, Temasek, dan Bain&Company.

Memasuki era globalisasi perkembangan transformasi digital terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu, berbagai sektor banyak merubah pola kinerjanya menggunakan digital baik dari sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pada transformasi digital yang dimana kini telah memasuki fase Industry 4.0 menjadi penggerak utama dunia industry mengalami pergeseran, yang semula menggunakan teknologi mesin kini telah berganti menggunakan teknologi digital.

Era ekonomi digital merupakan sebuah sistem baru yang memberikan cara pandang serta solusi dalam perekonomian dunia. Sedangkan pengertian ekonomi digital merupakan kegiatan perekonomian yang berjalan dengan memanfaatkan bantuan teknologi internet dan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*. Dengan adanya ekonomi digital dapat memudahkan kegiatan perekonomian secara umum.

Ekonomi digital mengubah pola cara dalam berekonomi, dari yang awalnya perekonomian dilakukan secara manual berubah dengan menjadi serba otomatis. Pelaku ekonomi dapat mengandalkan sistem untuk menjalankan kegiatannya. Kegiatan operasional yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja manusia, sekarang dapat dilakukan otomatis melalui sistem. Salah satu contoh dari adanya perubahan ekonomi digital adalah saat seorang pelaku usaha ingin membuka toko, pelaku usaha tersebut tidak lagi memerlukan bangunan fisik untuk dijadikan tempat usahanya melainkan dapat menggunakan teknologi untuk berjualan online, dari salah satu bentuk perubahan inilah yang memicu masyarakat umum untuk berkontribusi pada marketplace. Hal ini tentu akan menjadi salah satu faktor peningkat ekonomi khususnya pada UMKM, karena dengan modal yang minim masyarakat umum sudah bisa melakukan kegiatan perekonomian.

Di era ekonomi digital ini banyak bisnis serta transaksi perdagangan yang bertanformasi menggunakan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, perbankan bahkan investasi yang digunakan oleh setiap perusahaan dan individu. Pada industry 4.0, banyak perusahaan-perusahaan baru yang hadir dan berkembang secara pesat masuk ke dalam model bisnis elektronik atau yang biasa kita sebut dengan *e-commerce* dan *e-business*.

E-commerce adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Terdapat beberapa media yang digunakan diantaranya televisi, telepon, dan internet, namun untuk menggunakan media paling banyak digunakan melalui internet. Pengertian *E-commerce* menurut Laudon & Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan

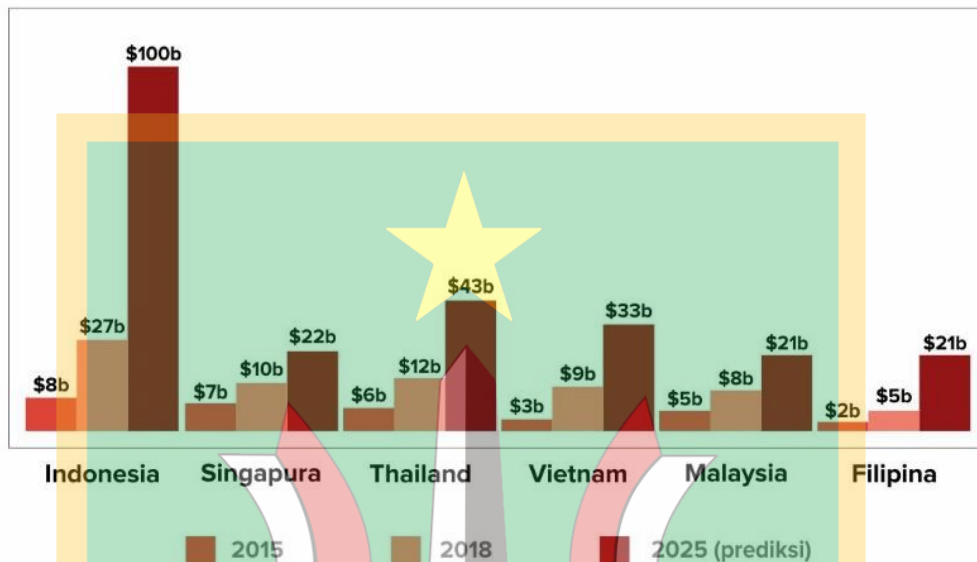
transaksi *business to business* dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer.⁶

Pemahaman mengenai *e-commerce* ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang bagaimana sistem yang terjadi pada *e-commerce* dan pasar. Istilah *e-commerce* digunakan sebagai penggambaran dari seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Sedangkan *marketplace* merupakan salah satu bentuk komponen dari *e-commerce* dan memiliki peran sebagai perantara antar penjual dan pembeli.

Perkembangan ekonomi digital juga merambah seluruh belahan dunia dengan cepat, hal itu tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi yang mengimbangnya. Pertumbuhan ekonomi global yang paling dekat dampaknya dengan Indonesia merupakan pertumbuhan ekonomi digital pada kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi ini juga pastinya akan mempengaruhi pola ekonomi pada Indonesia itu sendiri, contoh grafik pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN dapat dilihat dibawah ini.

⁶ Ahmad, "Pengertian E-Commerce: Jenis, Contoh, dan Manfaat", 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

Gambar 2. Valuasi pasar ekonomi digital di Asia Tenggara, berdasarkan Gross Merchandise Value

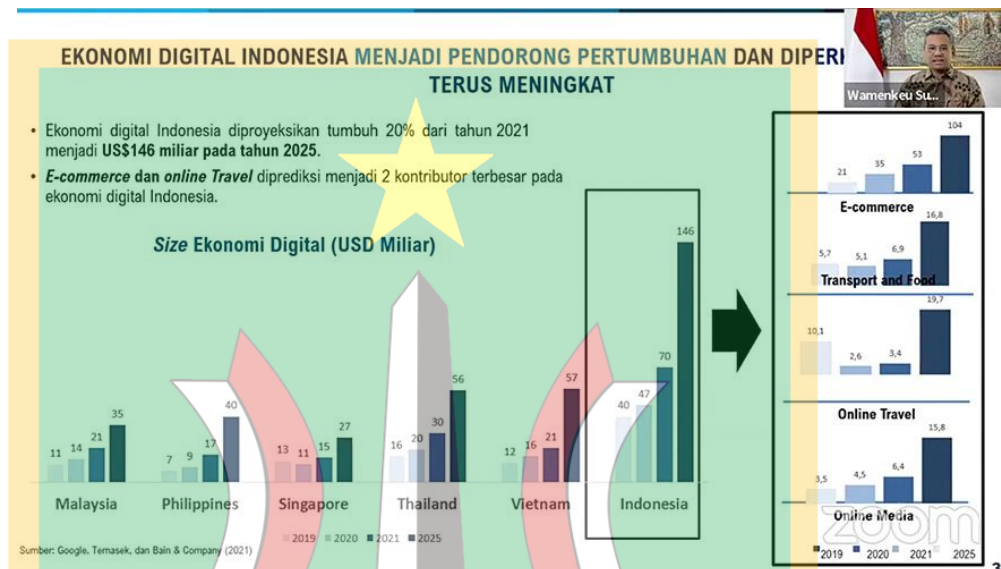


Sumber: Catcha Group

Pada table di atas dapat dilihat bahwa prediksi di tahun mendatang pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN akan bertumbuh dengan pesat, terlebih lagi pada Indonesia. Potensi pasar di Indonesia didorong dengan adanya pertumbuhan segmen *middle-class & affluent consumer* (MAC). Menurut *Boston Consulting Group* (BCSG), segmen di Indonesia bertambah sekitar 8-9 juta orang setiap tahunnya. Di tahun 2020 ini diprediksi jumlah MAC yang ada di Indonesia mencapai 141 juta orang sekitar 53 persen total populasi di Indonesia. Pada blog Kemenkeu, Ibu Suahasil Nazara selaku Wamenkeu juga menegaskan adanya transformasi ekonomi digital menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi digital Indonesia akan diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021

menjadi 146USD Miliar pada tahun 20225 mendatang dan diprediksi akan terus meningkat.⁷

Gambar 3. Data Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan

Adanya industry 4.0 membawa pergeseran pada pola perekonomian menjadi digitalisasi. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi digital sedang berkembang dengan pesat, hal tersebut dapat dilihat dengan kemunculan start-up milik Indonesia yang sudah memiliki status Unicorn. Istilah Unicorn diciptakan oleh Aileen Lee dan mulai dikenal di dunia sejak tahun 2013. Aileen Lee mendeskripsikan perusahaan start-up yang memiliki status Unicorn adalah perusahaan swasta yang memiliki valuasi USD 1 Miliar. Di tahun 2020 Indonesia telah memiliki 6 perusahaan start-up yang sudah memiliki status Unicorn yaitu,

⁷ Kementerian Keuangan RI, November 2022, "Wamenkeu: Ekonomi Digital Indonesia Sangat Kuat dan Terbesar di antara Negara Tetangga", <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Ekonomi-Digital-Indonesia-Sangat-Kuat>, diakses pada 15 April 2023.

Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Ovo, dan JD.ID. Bahkan terhitung sejak 2021 dua di antaranya telah melakukan merger atau penyatuan perusahaan yakni Gojek dan Tokopedia.

Dengan adanya ekonomi digital yang sudah memasuki industry 4.0 dan bahkan di Jepang sudah menghadirkan konsep Society 5.0 tentu nya isu tersebut sangat penting untuk dibahas dikalangan akademis. Dalam penelitian ini penulis juga akan memberikan rekomendasi dalam akademisi. Adapun novelty yang dihasilkan secara akademis, penelitian ini dimaksudkan untuk **mengkonfirmasi** apa saja target yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi digital Indonesia dalam forum ekonomi internasional G-20 2022 yang berdampak bagi kemajuan perekonomian digital di Indonesia dan menginisiasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Di era sekarang ini, perkembangan digital semakin berkembang dengan pesat. Banyak sektor yang bertransisi ke digitalisasi termasuk sektor ekonomi. Masuk nya e-commerce ke Indonesia membuat aktivitas jual-beli banyak dilakukan secara digital, hal tersebut mulai massif digunakan ketika pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 di forum G20 yang diselenggarakan di Jepang, Indonesia memberi usulan tentang IDEA Hub. Lalu pada tahun 2022 akibat tekanan serta krisis di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2022 Indonesia mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, Indonesia mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Tema ini diangkat oleh Indonesia,

sebagai suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan serta menyeluruh pasca pandemi. Selama memegang Presidensi G20, Indonesia akan membahas penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan daya saing global Pemerintahan terus berusaha mempercepat laju roda perekonomian nasional. Di tengah perekonomian global yang masih lesu, Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Karena itu pemerintah kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XI untuk memberi stimulus terhadap perekonomian nasional. Kemudian pemerintah juga akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun untuk meningkatkan daya saing global.

Pengembangan ekonomi digital dapat menjadi jawaban terhadap upaya memastikan bergeraknya sektor-sektor ekonomi produktif ditengah persaingan ekonomi global. Bagi Indonesia hal ini menjadi semakin strategis untuk dikembangkan bila melihat pertumbuhan PDB ekonomi digital Indonesia 2020 yang mampu tumbuh sebesar 11%.

1.2.2 Pernyataan Penelitian

Dari ketiga isu permasalahan yang telah berhasil diidentifikasi tersebut, penulis akan memfokuskan kepada peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi digital di Indonesia. Mulai dari hal yang menyebabkan tingginya

pertumbuhan ekonomi digital serta peningkatan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di masa pandemi. Karena Indonesia tentu termasuk sebagai negara yang menginginkan keamanan dalam menjalin hubungan luar negeri dalam sistem internasional. Dan diplomasi ekonomi muncul sebagai istilah baru yang diberitakan di media sehingga akrab di telinga masyarakat. Diplomasi ekonomi Indonesia terkhusus ekonomi digital dipahami sebagai upaya mengedepankan kepentingan ekonomi dalam menjalankan politik luar negerinya. Diplomasi ekonomi inilah sebagai salah satu strategi Indonesia dalam perannya untuk meningkatkan ekonomi digitalnya di forum G20.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Pertanyaan Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas tersebut, maka penulis mengajukan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Indonesia di forum G20 dalam peningkatan ekonomi digital?”**

1.3.2 Pertanyaan Operasional Penelitian

1. Bagaimana arah transformasi digitalisasi Indonesia pada forum G-20?
2. Bagaimana strategi dan kebijakan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di forum G20?

1.3.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana arah transformasi digitalisasi yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia di forum G20.

2. Untuk mengidentifikasi isu apa yang diprioritaskan Indonesia dalam meningkatkan ekonomi digital di forum G-20.
3. Untuk mengidentifikasi strategi dan kebijakan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di forum G20

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis membuat kerangka konseptual untuk menganalisis beberapa strategi maupun agenda yang akan dilaksanakan pada peningkatan ekonomi digital pada tahun 2022. Dari isu-isu yang dibahas serta agenda prioritas yang dirancang, dari aspek ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Sedangkan dari sisi aspek politik, Indonesia dapat mendorong kerja sama serta menginisiasi hasil nyata dari sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu momentum bagi Indonesia untuk mendapat kredibilitas atau kepercayaan dunia, dalam memimpin pemulihan global. Aspek pembangunan ekonomi dan sosial dapat dijadikan ajang dalam menarik potensi investasi di Indonesia.

